

SKRIPSI

**EVALUASI PROGRAM KELOMPOK MASYARAKAT
(POKMAS) DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
BERBASIS *COMMUNITY DEVELOPMENT* DI KELURAHAN
LEMBO, KECAMATAN TALLO, KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh:

MUH WIDYACHSAN WARISMAN

D101 20 1026



**PROGRAM STUDI SARJANA
TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
GOWA
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

EVALUASI PROGRAM KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS *COMMUNITY DEVELOPMENT* DI KELURAHAN LEMBO, KECAMATAN TALLO, KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

Muh Widyachsan Warisman
D101 20 1026

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Ir. Hj. Mimi Arifin, M.Si
NIP. 19661218 199303 2 001

Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin



Dr. Eng. Abdul Rachman Rasvid, ST., M.Si
NIP. 19741006 200812 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Widyachsan Warisman

NIM : D101201026

Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

Evaluasi Program Kelompok Masyarakat (POKMAS) Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Berbasis *Community Development* di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar

adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain dan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

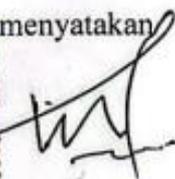
Semua informasi yang ditulis dalam skripsi yang berasal dari penulis lain telah diberi penghargaan, yakni dengan mengutip sumber dan tahun penerbitannya. Oleh karena itu, semua tulisan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penuli. Apabila ada pihak manapun yang merasa ada kesamaan judul dan atau hasil temuan dalam skripsi ini, maka penulis siap untuk klarifikasi dan mempertanggungjawabkan segala resiko.

Segala data dan informasi yang diperoleh selama proses pembuatan skripsi yang akan dipublikasi oleh penulis di masa depan harus mendapat persetujuan dari dosen pembimbing.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Gowa, 8 Agustus 2024

Yang menyatakan



Muh Widyachsan Warisman

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul “Evaluasi Program Kelompok Masyarakat (POKMAS) Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Berbasis *Community Development* di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan studi di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin

Skripsi ini dilatarbelakangi dengan melihat permukiman kumuh di perkotaan merupakan permasalahan yang mengakibatkan penurunan kesejahteraan masyarakat. Kota Makassar merupakan kota metropolitan yang mempunyai komitmen dalam penanganan permasalahan permukiman kumuh. Salah satu daerah yang menjadi fokus utama dalam penanganan yaitu Kecamatan Tallo, Kelurahan Lembo dengan melaksanakan Program Kelompok Masyarakat (POKMAS). Program POKMAS ini inisiasi dari pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan menggunakan dana kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun 2022-2023.

Program POKMAS diusul atas pertimbangan melihat hasil atau keberlanjutan dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Makassar Nomor 1301 Tahun 2021 tentang penetapan lokasi permukiman kumuh Kota Makassar menunjukkan luasan kumuh di Kelurahan Lembo mengalami perubahan dengan luasan dan tingkat kekumuhan menjadi 4,17 Ha dari kategori kumuh sedang jadi kumuh ringan yang secara administrasi berada pada RW 02 dan RW 05 Kelurahan Lembo. Sehingga Program POKMAS hadir berdasarkan SK Lurah Lembo Nomor 410 Tahun 2022 tentang pengukuhan Kelompok Masyarakat (POKMAS) Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan Lembo *zero* kumuh dengan lebih meningkatkan pola penanganan khusus memperhatikan partisipasi aktif masyarakat yang ada.

Program POKMAS bertujuan agar masyarakat dilibatkan aktif untuk berpartisipasi dalam program pemerintah melaksanakan pembangunan dibidang sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Lembo. Adapun pelaksanaan POKMAS di Kelurahan Lembo yang khususnya pada permukiman kumuh RW 02 dan RW 05 dilaksanakan sejak tahun 2022-2023. Kemudian, jenis kegiatan POKMAS yang telah dilakukan yaitu, pemasangan *paving block* di beberapa titik ruas jalan, pelatihan kerajinan tangan, pelatihan daur ulang sampah, sosialisasi stunting, dan sosialisasi TB.

Penelitian ini dinilai penting dengan memastikan tujuan dan sasaran penanganan permukiman kumuh yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai pelaksana Program POKMAS berhasil tercapai sesuai yang diinginkan, maka perlu dilakukan peninjauan terkait karakteristik permukiman kumuh dan evaluasi pelaksanaan Program POKMAS dalam penanganan permukiman kumuh berdasarkan persepsi masyarakat dan mengetahui arahan Program POKMAS dalam penanganan permukiman kumuh berbasis *community development* di lokasi penelitian.

Penulis telah berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini sebaik-baiknya. Namun, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak lain dikarenakan masih terbatasnya kemampuan penulis terutama dalam mendeskripsikan terkait dengan pokok pembahasan serta mengkorelasikan antara variabel yang menjadi inti permasalahan. Atas segala kekurangan penulis memohon maaf. Saran dan kritik dari para pembaca yang diharapkan demi perbaikan skripsi ini kedepannya.

Gowa, 3 Agustus.....2024



Muh Widyachsan Warisman

Situs dan alamat kontak:

Harap menuliskan sumber skripsi ini dengan cara penulisan sebagai berikut:

Warisman, M. W. (2024). *Evaluasi Program Kelompok Masyarakat (POKMAS) Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Berbasis Community Development di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar*. [Skripsi Sarjana, Prodi S1 PWK Universitas Hasanuddin]. Makassar.

Demi peningkatan kualitas dari skripsi ini, kritik dan saran dapat dikirimkan ke penulis melalui alamat email berikut ini: muhwidyachsan05@gmail.com.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta (Bapak ABD. Waris) dan (Ibu Amraniah) juga kakak kandung (Muh Widyarno Warisman) dan adik kandung (Nurul Syahbani Waris) atas curahan kasih sayang dan dukungan lahir batin yang diberikan dan seluruh keluarga yang senantiasa membantu serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Rektor Universitas Hasanuddin (Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.) yang telah memberikan izin penelitian serta fasilitas kampus selama masa perkuliahan;
3. Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Bapak Prof. Dr. Eng. Ir. Muhammad Isran Ramli., M.T.) atas segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan;
4. Ketua Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin (Bapak Dr. Eng. Abdul Rachman Rasyid, S.T., M.Si.) atas segala kasih sayang, bimbingan, dan nasehat yang diberikan;
5. Sekretaris Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin (Ibu Sri Aliah Ekawati, S.T., M.T.) atas ilmu dan pembelajaran yang telah diberikan;
6. Dosen Pembimbing skripsi sekaligus Kepala *Laboratorium Based Education (LBE) Housing and Settlements* (Ibu Dr. Ir. Hj. Mimi Arifin, M.Si.) atas segala bimbingan, arahan, nasihat, waktu, kepercayaan, serta ilmu yang diberikan kepada Penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
7. Kepala Studio Akhir (Ibu Dr. Techn. Yashinta K. D. Sutopo, S.T., MIP.) atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan bimbingan, motivasi dan dukungan;
8. Dosen Penguji (Ibu Dr. Wiwik Wahidah Osman, ST., MT. dan Bapak Gafar Lakatupa, ST., M.Eng.) atas ilmu, bimbingan, koreksi dan arahan yang telah diberikan semata-mata untuk peningkatan kualitas karya penulis.
9. Staf administrasi (Haerul Muayyar, S. Sos) dan seluruh dosen, staf administrasi serta *cleaning service* di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan membantu penulis sejak dari awal masuk perkuliahan hingga akhir perkuliahan;
10. Keluarga besar saya RASIO 2020 atau Mahasiswa Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin Angkatan 2020 atas kebersamaan dan pengalaman dari awal masa perkuliahan sampai saat ini;
11. Teman-teman di *Labo Based Education (LBE) Perumahan dan Permukiman* yang selalu menemani selama dalam perjalanan pengerjaan tugas akhir.
12. Teman-teman Filosofi Teh “Rumah Bersama” atas kebersamaan dan *support system* penulis hingga selesainya skripsi ini
13. Teman-teman BestCamp (Saudara Ahmad Firdaus Ibrahim, Khairul Rafliansyah, dan Renaldi) atas kebersamaan, kenangan dan pengalaman yang kocak dari awal masa perkuliahan sampai saat ini;

13. Teman-teman BestCamp (Saudara Ahmad Firdaus Ibrahim, Khairul Rafliansyah, dan Renaldi) atas kebersamaan, kenangan dan pengalaman yang kocak dari awal masa perkuliahan sampai saat ini;
14. Teman-teman tim 27 Studio Tugas Akhir (STA) yaitu, saudari Elsa dan Andi Nurul Fauziah atas saling memberi *support* dan kerjasama selama di STA dan
15. Seluruh pihak yang telah berkontribusi, mendukung, dan membantu yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Penulis berharap kritik serta masukan dari semua pihak demi perbaikan dan peningkatan kualitas dalam penyusunan karya ilmiah kedepannya. Semoga tugas akhir ini bermanfaat dan bernilai positif bagi semua pembaca.

Gowa, d. Agustus 2024



Muh Widyachsan Warisman

ABSTRAK

Muh Widyachsan Warisman. *Evaluasi Program Kelompok Masyarakat (POKMAS) Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Berbasis Community Development di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.* (dibimbing oleh Mimi Arifin)

Permukiman kumuh merupakan fenomena yang buruk di perkotaan. Sehingga, Pemerintah Kota Makassar melakukan beberapa penanganan termasuk Program POKMAS yang menunjuk Kelurahan Lembo sebagai pelaksana dengan tujuan menciptakan *zero* kumuh. Oleh karena itu, perlunya evaluasi untuk memastikan program berjalan dengan baik. Tujuan penelitian 1) mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh Kelurahan Lembo, Kota Makassar, 2) menganalisis penilaian evaluasi Program POKMAS dalam penanganan permukiman kumuh, 3) menyusun arahan Program POKMAS dalam penanganan permukiman kumuh. Data primer terdapat karakteristik permukiman dari sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan, serta lima variabel evaluasi yakni, efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsifitas, dan ketepatan. Kemudian, data sekunder berupa kebijakan dan pedoman mengenai permukiman kumuh dan surat keputusan Pemerintah Kota Makassar tentang lokasi permukiman kumuh tahun 2021. Teknik analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif, analisis skoring, dan analisis SWOT. Hasil penelitian: 1) Kondisi jalan rusak 90%, 23% peruntukan permukiman (ilegal), drainase terbuka sudah tersedia dan mampu mengalirkan air, 94% terlayani PDAM, 12,64% RTH, 91% distribusi dan daur ulang sampah sulit, pernah terjadi konflik, 36% masyarakat tidak memiliki pekerjaan, 4 lembaga Masyarakat, 4 Program penanganan permukiman kumuh, dan rawan terjadi kebakaran. 2) Program POKMAS cukup efektif sesuai dengan tujuan atau sasaran yang diinginkan, cukup efisien dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan, cukup bermanfaat/berdampak kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, cukup responsif antara pengelola dan masyarakat selama program berjalan, dan cukup tepat dalam pelibatan masyarakat. 3) Arahan membuat kegiatan yang sesuai kebutuhan masyarakat dalam memperbaiki kondisi fisik atau infrastruktur lingkungan, pengelolaan kegiatan intens pada sasaran masyarakat, dan menyiapkan rancangan anggaran kegiatan yang akuntabel dan transparan disetiap pelaksanaan kegiatan.

Kata Kunci: Permukiman Kumuh, POKMAS, *Community Development*, Kelurahan Lembo

ABSTRACT

MUH WIDYACHSAN WARISMAN. *Evaluation of POKMAS Program in Handling Slum Based on Community Development, Lembo, Tallo District, Makassar City.* (supervised by Mimi Arifin)

Slums are a bad phenomenon in urban areas. So that, Makassar City Government conducts several slum handling programs, one of which is the POKMAS Program to appoints Lembo as a committed implementer of creating zero slum. Therefore, evaluation important to ensure the program runs well. The research aims are 1) to identify characteristics of settlements in Lembo, Tallo district, Makassar city, 2) to analyse evaluation assessment of POKMAS Program in slum upgrading, 3) to develop a strategy of POKMAS Program in slum upgrading. The data used are primary data: five evaluation variables, effectiveness, efficiency, adequacy, responsive, and accuracy as well as settlement characteristics from social, culture, economic, environmental, and institutional, then secondary data is about policies and guidelines regarding slums and the Makassar City government decree on the location of slums in 2021. The analysis technique uses quantitative approach descriptif, scoring analysis, and SWOT analysis. The results: 1) road condition is damaged 90%, 23% of settlement allotments (illegal), open drainage is available and able to drain water, 94% served by PDAM, 12.64% green space, 91% of waste distribution and recycling is difficult, there have been conflicts, 36% of people do not have jobs, 4 community institutions, 4 slum management programmes, and prone to fire. 2) POKMAS program is quite effective in accordance with the desired goals or objectives, quite efficient in the implementation of activity management, quite useful/impactful activities according to community needs, quite responsive between managers and the community during the program, and quite appropriate in community involvement. 3) Direction to create activities that meet the needs of the community in improving the physical condition or environmental infrastructure, intense activity management on community targets, and prepare an accountable and transparent activity budget design in each activity implementation.

Keyword: Slum, POKMAS, Community Development, Lembo Sub-district

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	5
2.1 Evaluasi.....	5
2.2 Permukiman Kumuh.....	7
2.3 Penanganan Permukiman Kumuh.....	11
2.4 <i>Community Development</i>	17
2.5 Program Kelompok Masyarakat (POKMAS).....	20
2.6 Analisis SWOT (<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats</i>)	24
2.7 Studi Penelitian Terdahulu.....	25
2.8 Kerangka Konsep Penelitian.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Lokasi Penelitian.....	31
3.2 Jenis Penelitian.....	33
3.3 Jenis Data.....	33
3.4 Populasi dan Sampel.....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6 Teknik Analisis Data.....	38
3.7 Variabel Penelitian.....	41
3.8 Kerangka Penelitian.....	47
BAB IV PEMBAHASAN	49
4.1 Gambaran Umum Kota Makassar.....	49
4.2 Gambaran Umum Kelurahan Lembo.....	52
4.3 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	54
4.4 Karakteristik Permukiman Kumuh Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.....	59
4.5 Program POKMAS Kelurahan Lembo.....	87

4.6	Penilaian Evaluasi Program POKMAS.....	93
4.7	Arahan Program POKMAS Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Berbasis <i>Community Development</i>	100
BAB V	PENUTUP	111
5.1	Kesimpulan.....	111
5.2	Saran.....	112
	DAFTAR PUSTAKA	113
	LAMPIRAN	118
	<i>CURRICULUM VITAE</i>	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1	Kerangka konsep penelitian	30
Gambar	2	Peta lokasi spesifik penelitian skala 1:1.786.....	32
Gambar	3	Kerangka penelitian.....	48
Gambar	4	Peta administrasi Kota Makassar.....	51
Gambar	5	Peta administrasi Kelurahan Lembo.....	53
Gambar	6	Persentase jenis kelamin responden lokasi penelitian.....	55
Gambar	7	Persentase usia responden lokasi penelitian.....	56
Gambar	8	Persentase jumlah responden berdasarkan pendidikan terakhir.....	57
Gambar	9	Peta guna lahan lokasi penelitian.....	58
Gambar	10	Kondisi jalan lokasi penelitian.....	59
Gambar	11	Persentase hasil identifikasi kualitas akses jalan berdasarkan pandangan masyarakat.....	60
Gambar	12	Peta kondisi jalan lokasi penelitian.....	61
Gambar	13	Kondisi bangunan lokasi penelitian.....	62
Gambar	14	Persentase hasil identifikasi kesesuaian karakteristik lingkungan...	62
Gambar	15	Peta kesesuaian terhadap karakteristik lingkungan	63
Gambar	16	Persentase hasil identifikasi sistem drainase.....	64
Gambar	17	Peta kondisi drainase lokasi penelitian.....	65
Gambar	18	Kondisi jaringan air bersih.....	67
Gambar	19	Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL).....	67
Gambar	20	Persentase hasil identifikasi layak huni berdasarkan pandangan masyarakat.....	68
Gambar	21	Persentase hasil identifikasi ruang terbuka hijau	69
Gambar	22	Peta sebaran ruang terbuka hijau.....	70
Gambar	23	Kondisi TPS dan pengelolaan sampah.....	71
Gambar	24	Persentase hasil identifikasi pengelolaan persampahan berdasarkan pandangan masyarakat.....	72
Gambar	25	Peta kondisi dan pengelolaan persampahan.....	73
Gambar	26	Peta sebaran sarana dan prasarana umum.....	75
Gambar	27	Persentase hasil identifikasi interaksi sosial berdasarkan pandangan masyarakat.....	76
Gambar	28	Persentase hasil identifikasi sarana Pendidikan dan Kesehatan berdasarkan pandangan masyarakat.....	77
Gambar	29	Peta sebaran sarana Pendidikan dan Kesehatan.....	78
Gambar	30	Gapura informasi kampung tangguh narkoba.....	79
Gambar	31	Persentase hasil identifikasi kriminalitas berdasarkan pandangan masyarakat.....	79
Gambar	32	Persentase hasil identifikasi nilai budaya/adat istiadat berdasarkan pandangan masyarakat.....	80
Gambar	33	Produk UMKM KARLOTA (KARoppo LOrong TA') Kribas.....	82
Gambar	34	Tahap persiapan Program POKMAS di Kelurahan Lembo.....	87
Gambar	35	Persentase hasil wawancara dan kuesioner pada tahap persiapan berdasarkan persepsi masyarakat	87
Gambar	36	Tahap perencanaan Program POKMAS di Kelurahan Lembo.....	88

Gambar 37	Persentase hasil wawancara dan kuesioner pada tahap perencanaan berdasarkan persepsi masyarakat	88
Gambar 38	Tahap pelaksanaan Program POKMAS di Kelurahan Lembo.....	90
Gambar 39	Persentase hasil wawancara dan kuesioner pada tahap pelaksanaan berdasarkan persepsi masyarakat.....	91
Gambar 40	Tahap laporan akhir kegiatan dalam Program POKMAS di Kelurahan Lembo	91
Gambar 41	Persentase hasil wawancara & kuesioner pada tahap laporan akhir kegiatan berdasarkan persepsi masyarakat.....	92
Gambar 42	Diagram SWOT arahan Program POKMAS dalam penanganan permukiman kumuh Kelurahan Lembo.....	103
Gambar 43	Ilustrasi arahan Program POKMA dalam penanganan permukiman kumuh Kelurahan Lembo.....	106
Gambar 44	Arahan peningkatan kualitas jalan Kelurahan Lembo.....	107
Gambar 45	Arahan peningkatan jaringan drainase lingkungan.....	107
Gambar 46	Peta arahan pengelolaan persampahan di lokasi penelitian.....	109
Gambar 47	Dokumentasi pengumpulan data	117

DAFTAR TABEL

Tabel	1	Kriteria <i>ecosettlement</i> dan permukiman kumuh.....	9
Tabel	2	Kriteria penanganan permukiman kumuh.....	13
Tabel	3	Matriks SWOT.....	24
Tabel	4	Studi penelitian terdahulu.....	26
Tabel	5	Jumlah sampel permukiman Kelurahan Lembo.....	36
Tabel	6	Jumlah sampel.....	36
Tabel	7	Skor penilaian kriteria evaluasi Program POKMAS.....	39
Tabel	8	Penilaian kriteria evaluasi skala <i>likert</i>	39
Tabel	9	Perhitungan IFAS.....	40
Tabel	10	Perhitungan EFAS.....	40
Tabel	11	Variabel penelitian.....	42
Tabel	12	Luas daerah Kota Makassar menurut kecamatan.....	49
Tabel	13	Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Kota Makassar menurut kecamatan.....	50
Tabel	14	Jumlah penduduk Kel. Lembo berdasarkan jenis kelamin..	54
Tabel	15	Kepadatan penduduk dan rasio jenis kelamin penduduk...	54
Tabel	16	Luas kawasan berdasarkan RW Kel. Lembo.....	55
Tabel	17	Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin.....	55
Tabel	18	Jumlah responden berdasarkan kelompok umur.....	56
Tabel	19	Jumlah responden berdasarkan pendidikan terakhir.....	57
Tabel	20	Luasan guna lahan Kelurahan Lembo.....	57
Tabel	21	Kualitas akses jalan.....	59
Tabel	22	Sumber air bersih masyarakat.....	66
Tabel	23	Pekerjaan masyarakat.....	83
Tabel	24	Lembaga dan komunitas yang dibentuk masyarakat.....	83
Tabel	25	Program penanganan kumuh.....	84
Tabel	26	Kondisi proteksi kebakaran berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana.....	86
Tabel	27	Penilaian efektivitas Program POKMAS di Kelurahan....	93
Tabel	28	Penilaian efisiensi Program POKMAS di Kelurahan Lembo.....	94
Tabel	29	Penilaian kecukupan Program POKMAS di Kelurahan Lembo.....	95
Tabel	30	Penilaian responsifitas Program POKMAS di Kelurahan Lembo.....	97
Tabel	31	Penilaian ketepatan Program POKMAS di Kelurahan Lembo.....	98
Tabel	32	Klasifikasi faktor internal dan eksternal.....	99
Tabel	33	Matriks IFAS Program POKMAS dalam penanganan permukiman kumuh Kelurahan Lembo.....	101
Tabel	34	Matriks EFAS Program POKMAS dalam penanganan permukiman kumuh Kelurahan Lembo.....	101
Tabel	35	Perumusan komponen arahan menggunakan analisis Matriks SWOT.....	104
Tabel	36	Kuesioner penelitian tugas akhir.....	118

Tabel	37	Faktor-faktor strategis internal (<i>Internal Analysis Strategic/IFAS</i>).....	122
Tabel	38	Faktor-faktor strategis eksternal (<i>External Analysis Strategic/IFAS</i>).....	123

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Dokumentasi pengumpulan data.....	117
Lampiran 2	Kuesioner wawancara.....	118

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permukiman kumuh menjadi permasalahan yang mempengaruhi berbagai sektor di perkotaan. Peningkatan jumlah permukiman kumuh seiring dengan perkembangan kota dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan urbanisasi (Solehati dkk., 2017). Permukiman kumuh muncul akibat meningkatnya kebutuhan akan perumahan. Seringkali, pemerintah hanya menangani aspek fisik lingkungan tanpa melibatkan masyarakat dan memperhatikan daya dukung hunian yang terbatas. Kekurangan ini akan berdampak pada keberlangsungan peningkatan kualitas permukiman kumuh secara fisik, sosial, budaya, ekonomi dan kelembagaan (Sari & Ridlo, 2021).

Peningkatan kualitas permukiman kumuh penting menurut Aruan & Sinaga (2020) dan Caesarina et al. (2023) dengan memperhatikan aspek *community development* atau pengembangan masyarakat mencakup isu sosial, ekonomi, dan budaya lokal, serta membangun komunitas melalui pemberdayaan yang efektif. Selain itu, pemerintah daerah dapat melengkapi rencana peningkatan kualitas lingkungan fisik dan non-fisik dengan menyediakan pelatihan yang mendukung munculnya pelaku usaha, seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pelatihan ini bisa mencakup pembuatan dan pengemasan kerajinan lokal, produk makanan, pemasaran melalui media sosial, dan pengolahan produk untuk komoditas pemasaran skala kota yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Kota Makassar merupakan salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia sekaligus ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki luas 175,77 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.474.393 jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2024). Kota dengan perkembangan yang pesat dan sumber daya yang memadai menjadi menarik para pendatang untuk bermukim. Di samping itu, Kota Makassar memiliki banyak permasalahan yang menjadi program prioritas pemerintah yang harus diselesaikan salah satunya penanganan permukiman kumuh.

Kecamatan Tallo salah satu dari 14 kecamatan di Kota Makassar yang mendapatkan program penanganan permukiman kumuh. Inisiatif pemerintah

dengan melaksanakan Program POKMAS (Kelompok Masyarakat) menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun 2022-2023. Program POKMAS merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah di seluruh Indonesia dan bertujuan untuk melanjutkan hasil dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Makassar Nomor 1301 Tahun 2021 tentang penetapan lokasi permukiman kumuh mengalami perubahan luasan dan tingkat kekumuhan menjadi 4,17 Ha dari kategori kumuh sedang jadi kumuh ringan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan permasalahan di Kelurahan Lembo dari segi lingkungan, seperti pencemaran yang tinggi, fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai, kondisi ekologi kanal, serta rendahnya kesadaran akan kebersihan. Dari segi ekonomi, seperti kekurangan lapangan pekerjaan, kurangnya jumlah usaha, dan penurunan produktivitas ekonomi. Dalam aspek sosial-budaya, permasalahan urbanisasi penduduk yang tinggi, tingkat kriminalitas yang tinggi, pendidikan dan kesehatan yang rendah (Amalia, 2018).

Oleh karena itu, Program POKMAS yang diterapkan di Kelurahan Lembo bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana serta kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diatur oleh pemerintah. Program ini terlaksana di permukiman kumuh RW 02 dan RW 05 sejak tahun 2022-2023. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam Program POKMAS meliputi pemasangan *paving block* di beberapa ruas jalan, pelatihan kerajinan tangan, pelatihan daur ulang sampah, serta sosialisasi Stunting dan Tuberculosis (TBC).

Penelitian ini untuk memastikan tujuan dan sasaran Program POKMAS dalam penanganan permukiman kumuh Kelurahan Lembo berhasil sesuai yang diinginkan. Maka, perlu dilakukan peninjauan terkait karakteristik permukiman kumuh dan evaluasi Program POKMAS serta membuat arahan Program POKMAS dalam penanganan permukiman kumuh berbasis *community development*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan dari penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana karakteristik permukiman kumuh Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar?
2. Bagaimana penilaian evaluasi Program POKMAS dalam penanganan permukiman kumuh?
3. Bagaimana arahan Program POKMAS dalam penanganan permukiman kumuh berbasis *community development*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
2. Menganalisis penilaian evaluasi Program POKMAS dalam penanganan permukiman kumuh.
3. Menyusun atau membuat arahan Program POKMAS dalam penanganan permukiman kumuh berbasis *community development*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diharapkan langsung memberi kebermanfaatan kepada seluruh pihak. Manfaat penelitian dijabarkan sebagai berikut.

1. Bagi civitas akademik, penelitian ini bisa menjadi dasar atau bahan, kajian, serta tambahan pengetahuan bagi para pihak pengembang ilmu dalam memberikan informasi mengenai penerapan Program POKMAS dan diteruskan kepada masyarakat di lokasi penelitian sebagai pengabdian masyarakat;
2. Bagi pemerintah, penelitian ini bisa memberikan alternatif jawaban dalam mengatasi permukiman kumuh melalui Program POKMAS yang tidak hanya bersifat fisik tapi mengarah pada non-fisik seperti kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat lebih aktif dalam mendukung kegiatan dilakukan pemerintah;
3. Bagi masyarakat, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah semangat dan selalu memperhatikan lingkungan yang ada disekitar, sehingga mampu mengembangkan daerahnya sendiri (mandiri).

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Ruang lingkup wilayah.

Wilayah studi penelitian adalah permukiman di tepian kanal Panampu Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Secara administrasi, Kelurahan Lembo terdiri dari 5 RW dengan luas wilayah 33 hektar. Namun, ruang lingkup wilayah penelitian berpusat pada permukiman kumuh RW 02 dan RW 05 dengan luas sebesar 4,17 hektar. Disamping itu, juga melihat pengaruh permukiman dari wilayah sekitarnya yaitu RW 01, RW 03, dan RW 04 Kelurahan Lembo.

2. Ruang lingkup substansi

Substansi pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penjabaran karakteristik fisik dan non fisik permukiman di lokasi penelitian. Langkah yang dilakukan berupa identifikasi karakteristik permukiman di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
- b. Penjabaran evaluasi Program POKMAS dengan beberapa penilaian berdasarkan persepsi masyarakat dan faktor pendorong serta faktor penghambat dalam pelaksanaan Program POKMAS.
- c. Penyusunan arahan Program POKMAS dalam penanganan permukiman kumuh berbasis *community development* yang sesuai dengan hasil penilaian evaluasi Program POKMAS dan melihat dari karakteristik permukiman kumuh

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Evaluasi

Evaluasi suatu prosedur atau alat yang digunakan untuk mengetahui sesuatu sesuai aturan-aturan yang sudah ditentukan sehingga ditemukan solusi didalamnya. Kemudian, evaluasi program merupakan suatu kegiatan yang sistematis untuk melihat sesuatu berharga dan bernilai dari suatu sasaran. Evaluasi mengacu pencapaian tujuan dan harus membandingkan apa yang telah dicapai dari program sesuai standar yang telah disepakati ketika perencanaan program (Muryadi, 2017). Adapun penjelasan mengenai identitas evaluasi sebagai berikut:

2.1.1 Pengertian evaluasi

Evaluasi menurut Denzin & Lincoln (2000) ialah proses yang dipandu oleh fokus pada kepentingan kelompok yang membuat kebijakan dengan karakteristik tertentu untuk mempertanyakan pencapaian tujuan program yang telah tercapai. Keputusan yang diambil dalam proses ini digunakan sebagai penanda kinerja pada setiap tahapan evaluasi yang terdiri dari tiga kategori yaitu, rendah, moderat, dan tinggi. Untuk itu, evaluasi program dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis dan terorganisir.

Evaluasi program juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses penilaian secara deskriptif, dengan menyajikan data sebagai rekomendasi untuk selanjutnya digunakan dalam pertimbangan melakukan sesuatu ke depan. Dari hasil penilaian ini tentunya dapat dilihat hasilnya apakah dibenahi, disudahi ataupun diteruskan kepada pengambil kesimpulan yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap program tersebut (Arikunto & Jabar, 2009).

Evaluasi juga berupa kegiatan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan dirancang untuk menghasilkan informasi tentang kondisi suatu objek berdasarkan tujuan yang jelas dan terarah. Pendekatan evaluasi memberikan dampak yang baik dalam proses pengambilan keputusan karena informasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar untuk melihat berkelanjutan sebagai suatu pertimbangan pada suatu organisasi (Novalinda dkk., 2020)

2.1.2 Manfaat evaluasi

Manfaat diadakannya evaluasi dikemukakan oleh Sudjana (2006) dalam Widyoko (2010) sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa efektif kegiatan dilaksanakan dan seberapa jauh kebijakan mencapai tujuannya,
2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi dari suatu program,
3. Untuk memahami akuntabilitas publik untuk pemerintah bertanggung jawab kepada publik yang pemilik dana dan penerima manfaat dari kebijakan dan program yang diimplementasikan,
4. Stakeholders dapat melihat dengan jelas manfaat dari sebuah kebijakan dan program yang di implementasikan,
5. Untuk memberikan masukan yang berguna dari hasil evaluasi dalam pengambilan kebijakan di masa depan, sehingga kesalahan yang sama tidak terulang.

2.1.3 Model pelaksanaan evaluasi

Model evaluasi menurut Dunn (1994) dalam Musthofa (2011) seperti model evaluasi Program CIPP memiliki domain evaluasi *context*, *input*, *product*, dan *product*. Adapun penjabaran model evaluasi sebagai berikut:

1. Penentuan fokus dalam melakukan evaluasi (*focusing the evaluation*),
2. Penyusunan desain evaluasi (*designing the evaluation*),
3. Pengumpulan informasi (*collecting information*),
4. Analisis dan intepretasi informasi (*analyzing and interpreting*),
5. Pembuatan laporan (*reporting information*),
6. Pengelolaan evaluasi (*managing evaluation*), dan
7. Evaluasi untuk evaluasi (*evaluating evaluation*).

2.1.4 Kriteria evaluasi

Kriteria evaluasi terbagi atas lima aspek menurut Dunn (1994) dalam Musthofa (2011) yakni, sebagai berikut:

1. Efektivitas

Penilaian terkait efektivitas dalam suatu program utamanya dari segi teknis biasanya dilakukan dengan mengetahui bagaimana suatu program dapat mencapai hasil yang diharapkan dan sudah terlaksana secara merata.

2. Efisiensi

Efisiensi dalam suatu program dapat dilihat dari pertimbangan pelaksanaan program menghasilkan suatu jenis usaha yang baik atau perlu dilakukan revisi terhadap program tersebut. Penilaian kriteria efisiensi dengan menilai program apakah berjalan dengan cara paling optimal, dan menghasilkan output maksimal, dengan pengorbanan yang minimal.

3. Kecukupan

Dalam kriteria kecukupan, evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana tingkat efektivitas memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang yang mungkin menimbulkan masalah dalam sebuah program. Kriteria kecukupan mengedepankan dampak atau manfaat yang besar dari kegiatan yang berjalan.

4. Responsifitas

Penilaian kriteria responsifitas selalu melihat suatu program dapat memuaskan kebutuhan suatu kelompok yang dilakukan dengan melalui survey disetiap kelompok.

5. Ketepatan

Ketepatan dalam kegiatan ini melihat hasil sesuai dengan subansi yang ada juga melihat dari kegiatan yang telah dilaksanakan memberikan hasil yang bernilai atau bermanfaat.

2.2 Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh diukur berdasarkan kondisi ketidakteraturan bangunan, sosial, ekonomi, dan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat yang bermukim. Penjelasan mengenai pengertian permukiman kumuh dan karakteristik dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1 Pengertian permukiman kumuh

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman bahwa permukiman dikatakan kumuh ketika kondisi konstruksi yang buruk, kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan, sarana dan prasarana yang buruk, dan rendahnya kualitas hidup yang ada pada masyarakat yang bermukim.

Permukiman kumuh menurut Kurniasih (2007) bahwa sebagian besar penghuni permukiman kumuh bekerja di sektor informal atau memiliki pekerjaan tambahan di sektor informal. Pada umumnya, permukiman kumuh dihuni oleh penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah, jumlah penduduk yang melebihi kapasitas hunian, serta kurangnya sarana prasarana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Permukiman kumuh merupakan permukiman dengan bentuk hunian yang tidak berstruktur dan tidak berpola seperti, letak rumah dan jalannya tidak beraturan, tidak tersedianya fasilitas umum, prasarana dan sarana air bersih, Mandi, Cuci, Kakus (MCK). Kemudian, dalam penanganan berkaitan dengan pertumbuhan permukiman kumuh baru menghadapi tantangan yang sangat signifikan. Permukiman kumuh juga didefinisikan sebagai area permukiman yang tidak layak huni karena keberagaman struktur bangunan, kepadatan tinggi, dan kualitas bangunan, serta infrastruktur yang tidak memadai (Handika & Yusran, 2020; Wijaya, 2016).

Permukiman kumuh perkotaan merupakan kelompok masyarakat besar menimbulkan serangkaian masalah kesehatan yang beragam (Nayak dkk., 2024). Berdasarkan Bank Dunia 2020, dari program UN-Habitat (2020) terdapat 49% penduduk dunia tinggal di daerah kumuh perkotaan. Kemudian, dalam studinya menekankan analisis permasalahan permukiman kumuh dalam perspektif makro atau keseluruhan disamping itu seiring dengan tahapan perkembangan suatu negara mempunyai dampak langsung terhadap berkembangnya permukiman kumuh. Populasi daerah kumuh mempunyai tingkat perkembangan yang lebih tinggi pada semua penanganan permukiman yang ada yang memperlakukan daerah kumuh secara berbeda.

Dilansir dari Kompasiana.com menurut Salsabila (2020) permukiman kumuh suatu hal yang terlupakan dalam perkembangan perkotaan, ditandai dengan tingginya kepadatan penduduk, kondisi lingkungan yang tidak layak huni, dan kekurangan fasilitas pendidikan, kesehatan, serta sarana sosial-budaya. Kepadatan penduduk ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan perkotaan termasuk transportasi, perumahan, kesehatan lingkungan, penyediaan infrastruktur umum, tenaga kerja, ekonomi kota, dan tata ruang.

2.2.2 Karakteristik permukiman kumuh

Berdasarkan yang diungkapkan oleh UN-Habitat (2008) bahwa kriteria permukiman kumuh dilihat dari ketersediaan air minum yang aman tidak memadai, ketersediaan infrastruktur sanitasi tidak memadai, kualitas bangunan yang rendah, ruang huni yang padat, dan status hunian yang tidak aman.

Data Pusat Penelitian Pengebangan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum (2006) karakteristik dari permukiman kumuh dapat dilihat dari kriteria *ecosettlement* dan permukiman kumuh yang terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria *ecosettlement* dan permukiman kumuh

Aspek <i>Eco Settlement</i>	Kriteria
Ekologi	<i>Biodiversity</i> kualitas udara (termasuk emisi CO ₂), kualitas dan kuantitas air, rumah sehat, guna lahan, perubahan iklim, energi (siklus kalor, siklus hidrologis), dan teknologi berwawasan lingkungan
Sosial	Kapasitas masyarakat (pendidikan, partisipasi, kebiasaan)
Ekonomi	<i>Local economic development</i> (kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan/pendapatan)
Kelembagaan	Aksesibilitas (transportasi), kapasitas institusi, kerja sama, dan dukungan kebijakan.

Sumber: Puslitbangkim Kementerian Pekerjaan Umum, 2016

Adapun menurut Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (2021) bahwa karakteristik pemukiman kumuh meliputi penduduk sebagian besar memiliki pendapatan rendah, tingkat pendidikan rendah, sistem sosial, mayoritas penduduk bekerja di sektor informal, lingkungan permukiman dan perumahan kategori padat, serta fasilitas dan prasarana lainnya di bawah standar minimal untuk tempat tinggal.. Pemukiman kumuh sering kali menimbulkan ancaman bagi manusia dan lingkungan yang berinteraksi didalamnya.

Menurut Doxiadis (1968) dalam Dariwu dkk. (2016) mengemukakan bahwa ada lima elemen dasar yang terdapat dalam permukiman menurut prinsip *ekistics* yaitu pertama, alam yang merupakan lahan dapat digunakan untuk membangun tempat tinggal atau keperluan lainnya. Kedua, manusia baik individu maupun kelompok yang mendirikan atau tinggal di permukiman. Ketiga, masyarakat merupakan tempat interaksi sosial dan hubungan antar manusia yang membentuk komunitas tertentu. Keempat, bangunan tempat tinggal manusia dengan fungsi yang berbeda-beda. Kelima, jaringan yang mencakup infrastruktur dan sarana pendukung fungsi lingkungan, baik yang alami maupun buatan manusia.

Karakteristik permukiman kumuh dalam penelitian Kusuma & Rahmawati (2019) membagi dengan menggunakan indikator dari fisik bangunan, meliputi; ketidakteraturan bangunan, kondisi konstruksi bangunan, kondisi jalan, drainase, dan sanitasi. Dari sarana dan prasarana meliputi; persampahan, air bersih, proteksi kebakaran, dan ketersediaan RTH. Dari status lahan meliputi; kepemilikan lahan, kesesuaian peruntukkan. Dari ekonomi meliputi, jenis pekerjaan, pendapatan penduduk. Terakhir dari sosial meliputi, partisipasi masyarakat dan perilaku masyarakat.

Karakteristik permukiman kumuh menurut Sakdiah & Rahmawati (2020) tercermin dari kondisi fisik lingkungan, legalitas bangunan serta keadaan sarana dan prasarana dasar di dalam permukiman. Selain itu, karakteristik permukiman kumuh juga melihat kualitas lingkungan, kondisi kesehatan lingkungan, penggunaan lahan, tingkat kesempatan kerja yang tersedia, tingkat pendapatan penduduk, upaya pemberdayaan masyarakat, kepadatan penduduk, tingkat urbanisasi, tingkat pendidikan, partisipasi masyarakat, aspek budaya, kapasitas institusi dalam mengelola permukiman kumuh, dan peraturan yang berlaku di dalam wilayah permukiman kumuh.

Fitria & Setiawan (2014) menyimpulkan karakteristik permukiman kumuh dibagi menjadi permukiman ringan, sedang dan berat dengan meninjau aspek sarana dan prasarana, fisik lingkungan, sosial, ekonomi dan bahaya. Kemudian karakteristik permukiman kumuh juga diklasifikasikan oleh Muvidayanti & Sriyono (2019) dengan membagi dari kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi

pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, kondisi proteksi kebakaran. Kriteria permukiman kumuh dikatakan Widyarthara & Afdholy (2022) terdiri atas karakteristik lingkungan alam secara fisik, karakteristik manusia dan sosial kemasyarakatan, karakteristik lingkungan, dan karakteristik jaringan.

2.3 Penanganan Permukiman Kumuh

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman bahwasanya yang menetapkan kebijakan, strategi, dan pola penanganan yang kemanusiaan, sosial, ekonomi, dan budaya oleh daerah. Dalam peningkatan kualitas permukiman dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pemugaran

Tahap pemugaran perlu dilakukan rekontruksi permukiman yang ada agar menjadi layak huni.

2. Peremajaan

Peremajaan dianggap tepat dengan proses yang terlebih dahulu menyiapkan atau menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat. Hal ini pemerintah daerah harus melakukan penyediaan tempat tinggal yang melibatkan masyarakat sekitar ikut serta sesuai dengan aturan dan kewenangan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.

3. Permukiman kembali

Permukiman kembali ini bertujuan meningkatkan kualitas tempat tinggal dan melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat secara keseluruhan. Ini dilakukan dengan cara memindahkan penduduk yang terdampak dari lokasi yang tidak dapat direvitalisasi karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau rentan terhadap bencana. Proses permukiman kembali merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan provinsi, dengan keterlibatan aktif dari masyarakat setempat.

Berdasarkan yang dijelaskan CODI Baan Mankong (2019) dalam Shelby (2021) ada lima cara penanganan Permukiman Kumuh yang efektif diantaranya:

1. *On-site upgrading*

Strategi peningkatan di lokasi permukiman kumuh yang terdiri dari peningkatan layanan dasar pemerintah di masyarakat yang ada, sambil mempertahankan strukturnya, kemudian memperbaiki lingkungan fisik dan pelayanan dasar serta, melestarikan lokasi, watak dan struktur sosial.

2. *Reblocking*

Penerapan penanganan mengubah pola yang tidak teratur menjadi teratur sesuai dengan blok permukiman. Langkah ini bertujuan untuk menyusun kembali permukiman yang tidak teratur seperti, pembangunan jalan utama, jalan lingkungan, sistem drainase, infrastruktur listrik, dan air bersih. Selanjutnya, perlu persetujuan dari masyarakat yang terkena dampak renovasi rumah karena akan dilakukan proses pembebasan lahan yang telah disetujui dan dipersiapkan seluruh pendanaan. Proses peremajaan permukiman kumuh ini telah diimplementasikan di permukiman Charoenchai, Nimitmai, dan Bangkok pembangunan jaringan jalan dan renovasi rumah yang telah direncanakan ulang.

Contoh alternatif peremajaan untuk model penanganan *reblocking* adalah konsolidasi lahan yang merupakan suatu kegiatan terpadu menata kembali suatu wilayah yang tidak teratur menjadi teratur, lengkap dengan prasarana dan kemudahan yang diperlukan, agar tercapai penggunaan tanah/lahan secara optimal yang pada prinsipnya dilaksanakan atas swadaya masyarakat sendiri.

3. *Land sharing*

Penataan ulang atau *land sharing* merupakan proses penanganan permukiman lahan masyarakat yang memiliki tingkat kepemilikan yang cukup tinggi akan mendapatkan kembali lahan mereka dengan luas yang sama seperti yang mereka miliki secara sah. Berikut persyaratan penanganan permukiman dengan penataan ulang yang akan dilakukan antara lain:

- a. Tingkat pemilikan secara sah mempunyai bukti pemilikan atas lahan yang ditempatinya cukup tinggi dengan luasan yang terbatas.
- b. Tingkat kumuh tinggi dengan ketersediaan lahan yang memadai untuk menempatkan prasarana dasar.
- c. Tata letak bangunan tidak berpola.

4. *Reconstruction*

Permukiman yang tidak teratur diubah dengan menghancurkan dan membangun kembali permukiman yang sama di lokasi yang sama disesuaikan dengan standar aturan yang ada. Proses tahap ini melibatkan persetujuan dari masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh tersebut untuk melakukan renovasi, pembangunan ulang, dan memastikan tersedianya dana untuk renovasi dan pembangunan tersebut. Contoh dari peremajaan permukiman kumuh ini sudah diterapkan Bonkai dan Bangkok dengan membangun rumah susun.

Pembangunan rumah susun dilakukan dengan mengurangi ukuran lahan untuk perumahan dan meningkatkan luas bangunan. Lahan yang tersisa digunakan untuk membangun fungsi perkotaan yang produktif seperti area komersial, perkantoran, pusat hiburan, dan fasilitas lingkungan yang dibutuhkan.

5. *Relocation*

Relokasi permukiman beserta komunitasnya secara keseluruhan dari satu lokasi ke lokasi lain baik dari segi lingkungan tempat tinggal maupun sosial dan ekonomi dengan kondisi yang lebih baik. Awalnya, relokasi ini dilakukan secara tidak sukarela karena dipicu oleh rencana investasi yang tidak diinginkan oleh masyarakat terdampak.

kriteria penanganan permukiman kumuh menurut Rama dkk. (2018) menggunakan beberapa parameter dari empat aspek pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria penanganan permukiman kumuh

Aspek Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian penanganan dengan karakteristik lingkungan • Pencegahan dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan
Aspek Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya partisipasi/keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan program • Inklusi sosial/keterlibatan yang terbuka bagi seluruh program • Terbentuknya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan infrastruktur terbangun • Adanya peningkatan pengetahuan masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh
Aspek Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya peningkatan <i>skill</i> (keterampilan) dan ekonomi masyarakat • Adanya <i>job creation</i> (penciptaan lapangan kerja) • Tersedianya dana pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur terbangun
Aspek Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya lembaga tetap serta mempunyai struktur dan pembagian tugas yang jelas • Adanya lembaga yang <i>responsive</i>

-
- Adanya lembaga yang mempunyai kemampuan dalam penanganan permukiman
 - Partisipasi lembaga guna menciptakan dan mengembangkan usaha masyarakat
-

Sumber: Rama dkk, 2018.

Program penanganan permukiman kumuh dapat dilihat dari pelibatan masyarakat dalam setiap tahap penyelenggaraannya. Masyarakat selalu dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan melalui musyawarah ataupun rembuk warga yang biasanya pemerintah lakukan. Tahap penyelenggaraan menurut Kholqi, (2020) sebagai berikut:

1. Tahap persiapan

Persiapan dilakukan dengan membangun kapasitas, peran dan kontribusi pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan Pembangunan. Bentuk dari tahapan persiapan meliputi dua kegiatan utama yaitu:

- a. Sosialisasi dan membangun komitmen masyarakat yang dilakukan melalui berbagai kegiatan termasuk lokakarya,
- b. Pembentukan komunitas masyarakat yang aktif guna memajukan kondisi ekonomi disuatu permukiman.

Tahapan ini mampu menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan permukiman kumuh yang harus siap secara efektif dan matang.

2. Tahap perencanaan

Perencanaan dimulai langsung merumuskan keinginan masyarakat pada daerahnya berdasarkan kondisi eksisting permukiman layak huni demi kelangsungan kehidupan yang dituangkan sesuai aturan pembangunan lingkungan permukiman.

3. Tahapan pelaksanaan

Tahapan implementasi kegiatan baik kegiatan sosial, ekonomi maupun infrastruktur yang telah disusun dalam dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP). Pelaksanaan semua kegiatan harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan prioritas penanganan permukiman kumuh yang sudah ditetapkan sebelumnya.

4. Tahap keberlanjutan

Keberlanjutan suatu program untuk terlaksananya perawatan dan pemeliharaan atas apa yang telah dikerjakan melalui program penanganan permukiman kumuh sebelumnya.

Kusuma & Rahmawati (2019) mengungkapkan bahwa dengan penanganan permukiman kumuh perlu adanya peningkatan kualitas permukiman yang terdiri atas beberapa faktor, pertama, peningkatan kualitas jalan lingkungan yang belum sesuai dengan persyaratan teknis, faktor sanitasi yaitu penyediaan sarana MCK/jamban secara pribadi bagi masyarakat yang belum memiliki dan penyediaan sistem sanitasi terpadu, faktor persampahan yang mana penyediaan sarana persampahan di setiap rumah tangga, gerobak sampah tiap RW, dan TPS, serta membangun sistem pengelolaan 3R.

Berdasarkan penelitian Qonita & Rahmawati (2020) dalam menentukan strategi penanganan permukiman kumuh yang tepat dengan melakukan analisis tahapan sebelumnya dan meninjau *best practice* penanganan daerah permukiman kumuh yang ada. Untuk strategi permukiman kumuh yang diterapkan dengan memerhatikan aspek sebagai berikut:

1. Kondisi bangunan

Kondisi bangunan dilakukan peningkatan atau tambahan komponen bangunan rumah untuk memenuhi standar teknis gedung dan mengatasi masalah bangunan yang belum tertata dengan mengatur ulang lingkungan termasuk penataan jarak rumah dari tepi sungai sejauh 3 meter.

2. Kepadatan bangunan

Merancang bangunan yang padat fokus diberikan pada area dengan kepadatan lebih dari 100 unit per hektar dengan strategi mengembangkan konsep rumah bertingkat untuk memanfaatkan lahan tersisa sebagai ruang terbuka. Di sisi lain, untuk kawasan dengan kepadatan di bawah 100 unit per hektar akan diterapkan pengaturan kepadatan bangunan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mencakup pengaturan jarak minimal antar bangunan.

3. Jalan lingkungan

Strategi pada jalan lingkungan dilakukan dengan meningkatkan fungsi dan kualitas jalan, memperbaiki jalan yang rusak, meningkatkan perkerasan jalan dengan paving, dan menambahkan sarana pendukung jalan seperti Penerangan Jalan Umum (PJU). Selain itu, penting juga penambahan fasilitas seperti lampu jalan, lampu lalu lintas, dan penyeberangan zebra bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam beraktivitas menyeberang jalan.

4. Drainase

Drainase lingkungan yang diimplementasikan adalah normalisasi drainase, rehabilitasi saluran yang sudah ada, dan peningkatan kualitas sistem drainase. Selain itu, penting untuk memisahkan saluran drainase dari saluran limbah.

5. Air minum dan air bersih

Strategi yang diterapkan adalah rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan menambah jaringan pipa dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), memanfaatkan sumber air dari sungai atau permukaan, memperluas jaringan non-pipa, meningkatkan instalasi pengelolaan air minum, dan meningkatkan pelayanan penyediaan air minum.

6. Sanitasi

Strategi yang diterapkan adalah membangun WC umum, mengembangkan fasilitas MCK, dan tangki septik. Selain itu, strategi juga mencakup pengembangan tangki septik sesuai standar Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT), serta meningkatkan program pembangunan jamban dan tangki septik individu. Upaya lainnya termasuk peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur air limbah dan mencegah pencemaran sungai dengan limbah langsung.

7. Persampahan

Persampahan dilakukan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah seperti Tempat Pembuangan Sampah (TPS), armada pengangkut sampah, mengatur kelembagaan, dan melatih pengelolaan sampah. Di samping itu, penting untuk memastikan bahwa setiap gerobak sampah memiliki depo dengan jarak maksimal 15 menit perjalanan, dan setiap gerobak melayani sekitar 30-50 unit rumah. Kemudian, sistem pengelolaan sampah ditingkatkan dengan meningkatkan frekuensi pengangkutan sampah menjadi dua kali seminggu.

8. Proteksi bencana

Strategi dilakukan dengan meningkatkan sarana dan prasarana untuk proteksi kebakaran, seperti memperluas akses gang kebakaran atau jalur jalan kaki untuk mempermudah petugas penanggulangan kebakaran. Selain itu, disediakan akses jalan mobil Pemadam Kebakaran (PMK) yang cukup lebar dilengkapi dengan hidran kebakaran umum.

9. Kedekatan dengan lokasi industri

Membangun atau menyediakan lahan untuk RUSUNAWA khusus bagi pekerja dengan lokasi minimal dua kilometer dari area industri.

10. Kemudahan dalam memperoleh Transportasi

Strategi yang diterapkan adalah meningkatkan transportasi umum di kawasan Krian dengan cara menambah rute layanan atau menyediakan layanan becak.

11. Fasilitas Pendidikan, Kesehatan, dan Perdagangan

Strategi pada bagian ini, merawat dan memelihara fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perdagangan yang sudah ada.

12. Ruang terbuka hijau

Strategi yang diimplementasikan adalah memanfaatkan lapangan yang tersedia sebagai ruang terbuka hijau, serta menambahkan jalur hijau di sepanjang sisi jalan lingkungan dan merawat taman-taman yang sudah ada.

13. Jenis pekerjaan

Strategi yang diterapkan adalah menyediakan tempat tinggal yang khusus untuk pekerja industri yang sudah ada.

2.4 Community Development

Community development atau pengembangan masyarakat suatu konsep pemberdayaan masyarakat yang secara lebih luas daripada pembangunan ekonomi. Fokus pengembangan masyarakat pada pengembangan dan aktivitas terkait dalam komunitas masyarakat berbasis budaya dan sumber daya yang ada disuatu tempat (Hale dkk., 2023).

2.4.1 Pengertian community development

Sumodiningrat, (1999) berpendapat bahwa *community development* merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mewujudkan kemandirian dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan serta keterbelakangan. Konsep *community development* dalam wacana pengembangan biasanya selalu dikaitkan dengan konsep kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. *community development* harus dilakukan melalui 3 (tiga) jalur, yaitu:

1. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*Enabling*);

2. Memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat (*Empowering*);
3. Memberikan perlindungan (*Protecting*).

Menurut Nursoyo (2008) usaha ekonomi produktif yang ada atau akan dibentuk pada masing-masing wilayah diidentifikasi berdasarkan kriteria tertentu, dipilih untuk dikembangkan sebagai sasaran pembinaan. Pengembangan dilakukan melalui pembinaan manajemen usaha, bantuan modal bergulir dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

Conyers (1991) juga memberikan tiga alasan utama sangat pentingnya *community development* penting dalam pengembangan permukiman, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan dan proyek akan gagal,
2. Masyarakat mempercayai program pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena masyarakat lebih mengetahui seluk beluk proyek dan merasa memiliki proyek tersebut,
3. Partisipasi merupakan hak demokrasi masyarakat dalam keterlibatannya di pembangunan.

Tahapan dalam pemberdayaan masyarakat dapat dipahami melalui aspek utama yaitu, menciptakan lingkungan yang mendukung agar potensi masyarakat dapat berkembang, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah konkret yang mencakup penyediaan berbagai sumber daya dan peluang, dan melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah. Upaya pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan martabat lapisan masyarakat bawah yang masih terperangkap dalam kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Oleh karena itu, pemberdayaan tidak hanya memperkuat individu tetapi juga struktur sosial yang ada (Noor, 2011).

Upaya *community development* mendorong masyarakat untuk mandiri, mampu mengambil keputusan sendiri, berinisiatif, dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Ada salah satu kiat sukses dinamakan *Community Action Plan (CAP)* yang telah dilaksanakan di wilayah Bali. Dengan melakukan survei desa sendiri, masyarakat belajar bagaimana mengidentifikasi dan menyelidiki masalah dan nilai untuk mengetahui lebih jauh tentang nilai dan persoalan masyarakat, hasil survei

desa didiskusikan dalam diskusi masyarakat. Konsultan perencana dan Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM) wajib melakukan pembinaan terhadap penataan lingkungan permukiman yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri (Zubaidah, 2022).

2.4.2 Prinsip *community development*

Community development bermakna dengan melihat nilai keterbukaan, persamaan, pertanggungjawaban, kesempatan, pilihan, partisipasi, saling menguntungkan, dan timbal balik, serta pembelajaran terus menerus. Prinsip *community development* menurut Nugraha (2009) adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi, masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan.
2. Kesetaraan dan keadilan gender, laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan serta dalam menikmati manfaat dari kegiatan tersebut secara adil.
3. Demokratis, setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada suatu kepentingan masyarakat.
4. Transparansi dan akuntabel, masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.
5. Keberlanjutan, setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

2.4.3 Keunggulan *community development*

Kelebihan *community development* dalam menggali potensi lokal daerah menurut Endah (2020) dibanding dengan metode lain sebagai berikut:

1. Mengetahui kebutuhan masyarakat yang dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan dan perubahan sejalan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. Kemampuan mengetahui kebutuhan merupakan manifestasi

kapasitas masyarakat dalam membandingkan antara realitas kini dan realitas ideal sebagaimana yang diinginkan masyarakat;

2. Mampu mengidentifikasi potensi yang ada, sumberdaya dan peluang yang juga selalu berkembang. Tanpa adanya kegiatan tersebut maka potensi dan sumberdaya yang ada akan tetap bersifat laten dan tidak teraktualisasi bagi pemenuhan kebutuhan. Kegiatan identifikasi, perlu dilakukan sebagai salah satu pengetahuan dari prinsip pengutamaan potensi dan sumberdaya lokal dalam pemberdayaan masyarakat. Identifikasi ini diperlukan untuk melihat keseluruhan potensi dan sumberdaya yang tersedia, baik berupa sumberdaya alam, sumber daya manusia, maupun sumberdaya sosial. Sumberdaya sosial memiliki tingkat signifikansi yang tidak kalah penting dari sumberdaya lainnya. Pengembangan masyarakat yang berbasis dinamika internal adalah proses perubahan yang mengandalkan dorongan energi internal dan potensi dan sumberdaya yang ada;
3. Untuk mencari cara yang lebih menguntungkan dalam memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada. Melalui proses belajar sosial dan proses adaptasi dengan lingkungannya, masyarakat akan menemukan cara dan pengetahuan tentang pemanfaatan sumberdaya yang tersedia. Selain itu, potensi maupun sumber daya manusia yang ada dalam suatu permukiman sangat dibutuhkan dalam penanganan permukiman kumuh. Kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki menjadi keharusan diterapkan secara sistematis dan konsisten, haruslah dikelola dengan baik agar menjadi sumber penghidupan bagi generasi berikutnya.

2.5 Program POKMAS (Kelompok Masyarakat)

POKMAS merupakan program pemerintah daerah yang dibentuk di tingkat kelurahan melalui mekanisme musyawarah kelurahan untuk ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa kegiatan program pemberdayaan masyarakat. Regulasi dari terlaksananya program POKMAS berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang pedoman swakelola. POKMAS beranggotakan dari unsur

masyarakat yang memiliki kemampuan dan komitmen melaksanakan pekerjaan swakelola. (Laporan Pertanggungjawaban Program POKMAS, 2023).

2.5.1 Latar belakang dan sejarah Program POKMAS

Permasalahan permukiman kumuh yang selalu menjadi perbincangan diwilayah perkotaan perlu dilihat dari segi kesejahteraan masyarakat. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dilakukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun yang mengatur peran partisipasi masyarakat termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Partisipasi masyarakat memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi masyarakat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dibuat regulasi tentang pembentukan kelompok masyarakat guna melaksanakan swakelola kegiatan. Hal ini berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang pedoman swakelola kegiatan di permukiman yang dikelola sendiri oleh suatu kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pembentukan organisasi masyarakat dengan membuat program peningkatan kualitas permukiman yang tersebar di seluruh kecamatan dan kelurahan/desa. Program Kelompok Masyarakat (POKMAS) disetiap kelurahan menjadi solusi perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam penanganan permukiman kumuh yang mengedepankan masyarakat sebagai pelaksana diberbagai kegiatan yang ada didalamnya (Laporan Pertanggungjawaban Program POKMAS, 2023).

2.5.2 Tujuan Program POKMAS

Tujuan Program POKMAS dijabarkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan daerah *zero* kumuh dengan fasilitas sarana prasarana dan fasilitas sosial yang baik,

2. Berusaha meningkatkan sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan
3. Membina rasa persaudaraan dikalangan para masyarakat serta mengabdikan bagi kepentingan agama, nusa, dan bangsa
4. Meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok masyarakat kelurahan.
5. Menerapkan aturan yang telah disepakati dengan serius sebagai upaya mengubah gaya hidup yang sehat dan bersih dari masyarakat.

2.5.3 Tahapan kegiatan Program POKMAS tingkat kelurahan

Pelaksanaan Program POKMAS diperlukan tahapan yang matang agar kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Adapun tahapan pelaksanaan Program POKMAS terbagi menjadi empat tahapan yaitu, tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan laporan akhir kegiatan. Untuk penjelasan lebih rinci pada setiap tahapan, sebagai berikut:

1. Persiapan

Tahap persiapan merupakan langkah awal pelaksanaan program yang dimulai dengan diskusi antara pemerintah kabupaten/kota untuk mendata kecamatan yang membutuhkan perhatian khusus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Persiapan ini bertujuan untuk memperkuat program POKMAS di tingkat kelurahan dengan membahas kapasitas, peran, dan kontribusi pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan/desa, masyarakat, serta pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program POKMAS. Selain itu, dipertimbangkan juga penggalangan relawan yang akan berperan sebagai pengurus dalam berbagai kegiatan yang dilakukan.

Kegiatan persiapan program POKMAS meliputi pemetaan aktor yang terkait dengan masalah kekumuhan melalui sosialisasi dan membangun komitmen bersama seluruh pihak yang akan terlibat. Ini dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti rembuk warga di tingkat kelurahan dan pembentukan tim inti pengurus POKMAS. Dari tahap ini akan didiskusikan oleh pengurus sebelum kegiatan pelaksanaan kegiatan melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) atau biasanya disebut musyawarah kelurahan

2. Perencanaan

Perencanaan dengan melaksanakan FGD/musyawarah kelurahan. Kegiatan FGD ini lebih memperjelas arah kegiatan dan merumuskan kondisi permukiman layak huni yang diinginkan oleh masyarakat di tingkat kelurahan yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan pembahasan lingkungan permukiman yang kumuh terkait kesehatan, kemiskinan, kebencanaan, dan disabilitas. Adapun arah dari kegiatan seperti kegiatan pelatihan pembuatan kerajinan tangan, pelatihan daur ulang sampah, sosialisasi pencegahan stunting, dan sosialisasi pencegahan TB.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah tahap inti di mana kegiatan dijalankan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Kegiatan yang dilakukan mencakup aspek sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang masing-masing disusun dalam dokumen terpisah. Setiap kegiatan memiliki satu dokumen dan satu penanggung jawab. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas untuk menghindari kesalahan dan perdebatan masyarakat. Sumber pembiayaan untuk kegiatan pembangunan dapat berasal dari dana kelurahan yang dialokasikan dari APBD Kabupaten/Kota dan sumbangan swadaya masyarakat. Pelaksanaan kegiatan mencakup berbagai aktivitas infrastruktur, ekonomi, dan sosial, antara lain sebagai berikut:

- a. Kegiatan sosial termasuk pengembangan kapasitas di tingkat kelurahan/desa mencakup sosialisasi untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta kegiatan sosial lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Kegiatan ekonomi meliputi pelatihan pembuatan kerajinan untuk meningkatkan penghidupan komunitas kecil dan kegiatan ekonomi lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Detail kegiatan ekonomi ini telah dijelaskan secara rinci dalam dokumen Program POKMAS.
- c. Kegiatan infrastruktur lingkungan terkait penanganan permukiman kumuh seperti perbaikan jalan, sanitasi, dan infrastruktur dasar lainnya.

4. Laporan akhir kegiatan (pertanggung jawaban)

Laporan akhir ini sebagai wujud dari penggunaan anggaran dan pernyataan bahwa kegiatan telah dilaksanakan. Laporan akhir ini juga sekaligus menilai keberlanjutan

kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus dengan kreatifitas dan inovasi baru tentunya.

2.6 Analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*)

Analisis SWOT adalah suatu metode analisis yang melihat kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang ada pada suatu tempat dengan mencari data dari faktor internal dan faktor eksternal (Bell & Rochford, 2016. dalam Wahyudin dkk., 2021). Analisis ini dilakukan dengan melihat kekuatan dan kelemahan dikelompokkan kedalam faktor internal, sementara peluang dan ancaman dikelompokkan sebagai faktor eksternal. Hasil dari analisis ini sebagai arahan atau rekomendasi dalam memecahkan suatu permasalahan.

Analisis menggunakan matriks SWOT yang memadukan peluang dan ancaman sebagai penilaian, kemudian dilakukan penyesuaian terhadap kekuatan dan kelemahan sebagai kunci dalam menghasilkan empat alternatif arahan seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. Matriks SWOT

Faktor Internal	Kekuatan (<i>strengths</i>)	Kelemahan (<i>weakness</i>)
Faktor Eksternal		
Peluang (<i>opportunity</i>)	Strategi S-O Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi W-O Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Ancaman (<i>threats</i>)	Strategi S-T Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi W-T Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber: Bell & Rochford (2016) dalam Wahyudin dkk. (2021).

Berdasarkan tabel diatas, matriks analisis SWOT dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi S-O merupakan bagian dari strategi untuk menggunakan seluruh kekuatan dengan memanfaatkan peluang yang ada.
2. Strategi W-O bagian dari strategi untuk meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang.
3. Strategi S-T bagian dari strategi untuk menggunakan kekuatan dalam mengatasi ancaman.

4. Strategi W-T bagian dari strategi untuk meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

2.7 Studi Penelitian Terdahulu

Dalam studi penelitian terdahulu meliputi acuan dalam penyusunan penelitian ini berupa kajian literatur. Tabel berikut menjabarkan penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini.

Tabel 4. Studi penelitian terdahulu

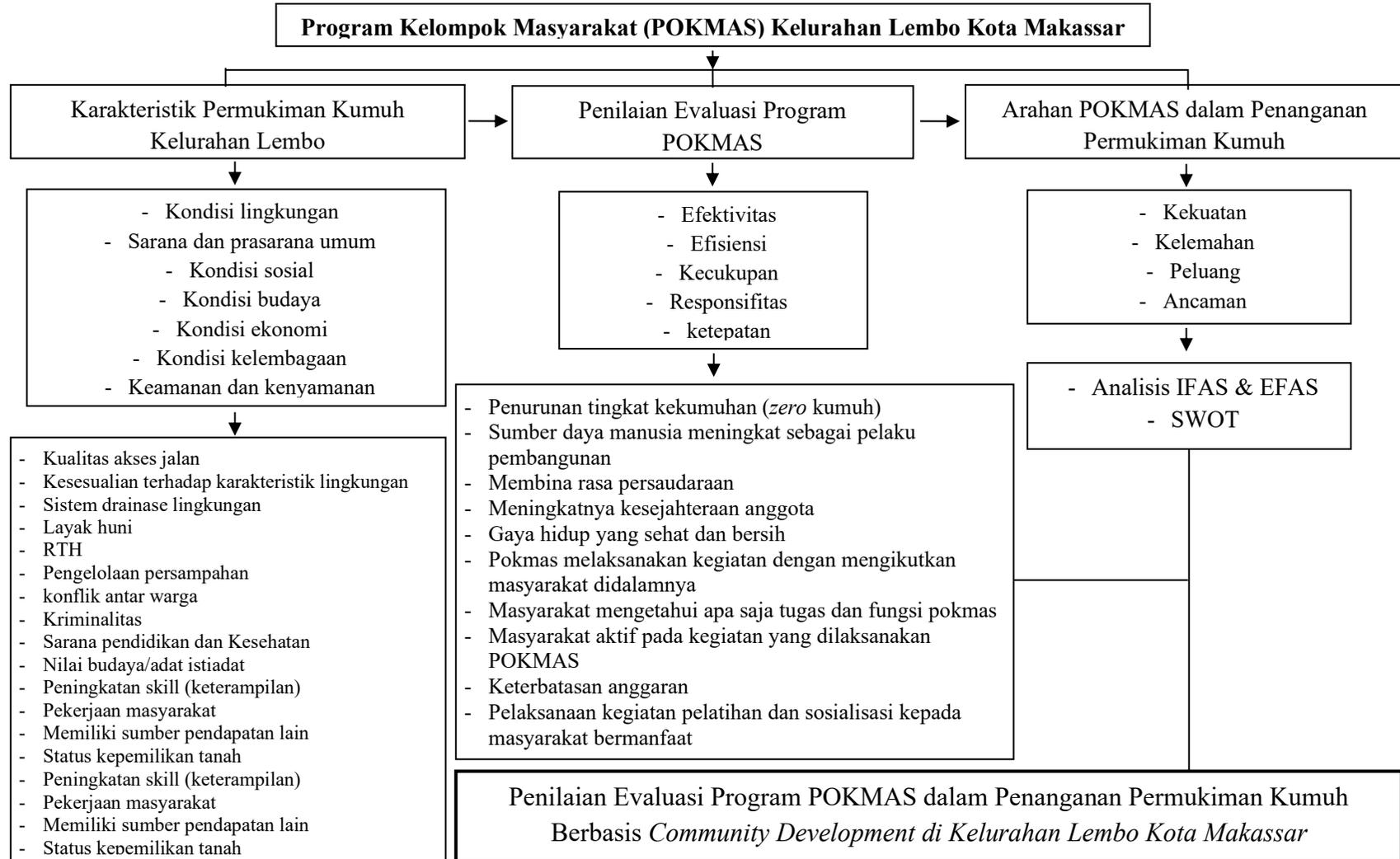
No	Peneliti/Tahun	Judul	Tujuan	Variabel Penelitian	Perbedaan & Persamaan	Output	Sumber
1	Putri Nur Chasan dan Ilmi Usrotin Choiriyah, Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, 2024.	Pemberdayaan an Kelompok Masyarakat (POKMAS) pada Program Ketahanan Pangan di Wisata Buah	Untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan Kelompok Masyarakat (POKMAS) pada Program Ketahanan Pangan di Wisata Buah.	<i>authority</i> (wewenang), <i>Confidence and Competence</i> (Rasa percaya diri dan Kemampuan), <i>Trust</i> (Keyakinan), <i>Opportunities</i> (Kesempatan), <i>Responsibilities</i> (Tanggung Jawab), <i>Support</i> (Dukungan).	Perbedaan: variabel evaluasi dari penelitian ini melihat <i>authority</i> (wewenang), <i>Confidence and Competence</i> (Rasa percaya diri dan Kemampuan), <i>Trust</i> (Keyakinan), <i>Opportunities</i> (Kesempatan), <i>Responsibilities</i> (Tanggung Jawab), <i>Support</i> (Dukungan).	Hasil dari penelitian ini adalah melihat pemberdayaan kelompok masyarakat dengan menggunakan 6 indikator <i>ACTORS</i>	https://journal.ipm2.kpe.or.id/index.php/KAGAN/GA/article/view/8520 .
2	James Hale, Aiden Irish, Michael Coralan, Jill K. Clark, Shoshanah Inwood, Becca B.R. Jablonski, dan Tom Johnson. <i>Journal of</i>	A Systematic Review of Cultural Capital in U.S. Community Development Research	Untuk mengkaji konseptualisasi dan penerapan budaya dalam pengembangan masyarakat yang masih belum terselesaikan dan seringkali	- <i>Eligibility and exclusion criteria</i> - <i>Record screening</i> - <i>Data analysis</i>	Persamaan: Aspek Budaya dalam pengembangan masyarakat dapat dipahami sebagai sesuatu yang perlu dilindungi karena bagian dari upaya Pembangunan dalam hal ini gotong royong. Disini budaya harus dilestarikan atau dijaga dengan bersama bisa mengoreksi atau setidaknya kembali ke budaya yang aslinya.	Hasil dari penelitian ini menguraikan lokasi penelitian yang ditinjau, pendekatan metodologis mempelajari modal budaya, dan bagaimana modal budaya dikonseptualis	https://doi.org/10.1016/j.jrurs.tud.2023.103113

No	Peneliti/Tahun	Judul	Tujuan	Variabel Penelitian	Perbedaan & Persamaan	Output	Sumber
	<i>Rural Studies</i> , 2023.		kurang berkembang.			asikan dan diterapkan pada praktik dan penelitian pengembangan masyarakat.	
3	Mega Utami Putri dan Muhammad Nur Yamin, <i>Pinisi Journal of Social Science</i> , Vol 1, No. 1, 2022	Evaluasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) (Studi di Kecamatan Mariso Kelurahan Mariso Kota Makassar)	Untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Mariso Kelurahan Mariso Kota Makassar, dan dampak dari pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Mariso Kelurahan	- Tujuan program - Analisis masalah - Deskripsi dan standarisasi - Pengukuran perubahan - Perubahan terhadap akibat dari kegiatan - Dampak program	Perbedaan: pada penelitian ini melakukan konsep evaluasi kebijakan Edward A Suchman Indikator yang kurang baik dalam pelaksanaan evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Mariso ialah tujuan program, analisis masalah, pengukuran perubahan, perubahan terhadap akibat dari kegiatan, dan dampak program. Adapun indikator yang berjalan dengan baik yaitu deskripsi dan standarisasi.	Evaluasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) (Studi di Kecamatan Mariso Kelurahan Mariso Kota Makassar) merupakan salah satu bukti ilmiah akan pentingnya penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Mariso demi mewujudkan	https://ojs.unm.ac.id/pjss/article/view/3456/0

No	Peneliti/Tahun	Judul	Tujuan	Variabel Penelitian	Perbedaan & Persamaan	Output	Sumber
			Mariso Kota Makassar.			pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen	
4	Ririn Putri Kusuma dan Dian Rahmawati, Jurnal Teknik ITS. Vol. 8, No. 2. 2019	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo	Merumuskan arahan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Desa Tambak Cemandi, Sidoarjo.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketidakteraturan bangunan - Kondisi konstruksi bangunan - Kondisi jalan - Drainase - Sanitasi - Persampahan - Air bersih - Proteksi kebakaran - Ketersediaan RTH - Kepemilikan lahan - Kesesuaian peruntukan - Jenis pekerjaan - Pendapatan penduduk 	Persamaan: Arah peningkatan kualitas permukiman berdasarkan hasil karakteristik permukiman kumuh, Faktor berpengaruh terhadap peningkatan kualitas permukiman kumuh di wilayah studi, antara lain kondisi jalan, drainase, persampahan, pendapatan penduduk, partisipasi masyarakat dan perilaku masyarakat.	Arahan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Desa Tambak Cemandi, Sidoarjo.	https://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/issue/viaw/35

No	Peneliti/Tahun	Judul	Tujuan	Variabel Penelitian	Perbedaan & Persamaan	Output	Sumber
				- Partisipasi masyarakat - Perilaku masyarakat			
5	Andi Annisa Amalia, Jurnal <i>National Academic Journal of Architecture (NATURE)</i> . Vol. 5, No. 1. 2018. Hlm 13-22	Karakteristik Hunian Permukiman Kumuh Kampung Sapiria Kelurahan Lembo Kota Makassar	Mengidentifikasi karakteristik kumuh Kampung Sapiria dari aspek bangunan hunian meliputi ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan hunian, ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, dan legalitas bangunan.	- Ketidakteraturan bangunan hunian - Kepadatan bangunan hunian - Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan - Legalitas bangunan	Perbedaan: pada penelitian ini hasil identifikasi karakteristik hunian permukiman kumuh Kampung Sapiria diketahui bahwa 28 % bangunan yang memiliki ketidakteraturan. Sebanyak 85 % bangunan hunian yang memiliki luas lantai tidak sesuai standar. Sebanyak 22 % bangunan hunian tidak sesuai persyaratan teknis. Sebanyak 10 % bangunan hunian memiliki IMB dan sebanyak 5 % dengan status lahan milik.	Hasil dari penelitian ini berupa deskripsi terkait kondisi karakteristik hunian permukiman kumuh Kampung Sapiria Kelurahan Lembo, Kota Makassar.	https://doi.org/10.24252/nature.v5i1a2 .

2.8 Kerangka Konsep Penelitian



Gambar 1. Kerangka konsep penelitian